

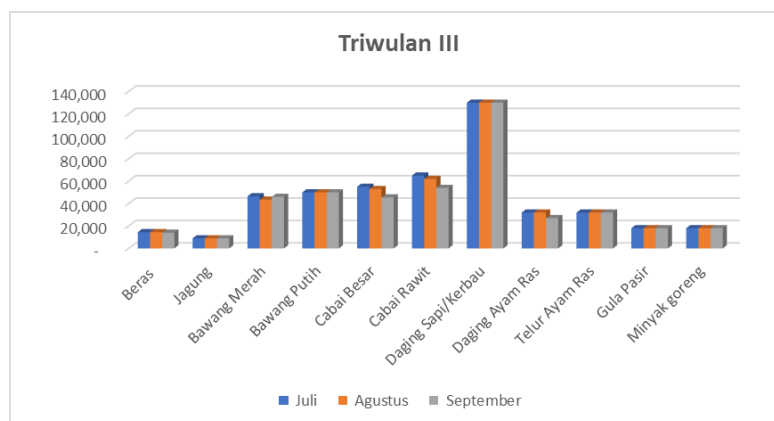
1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

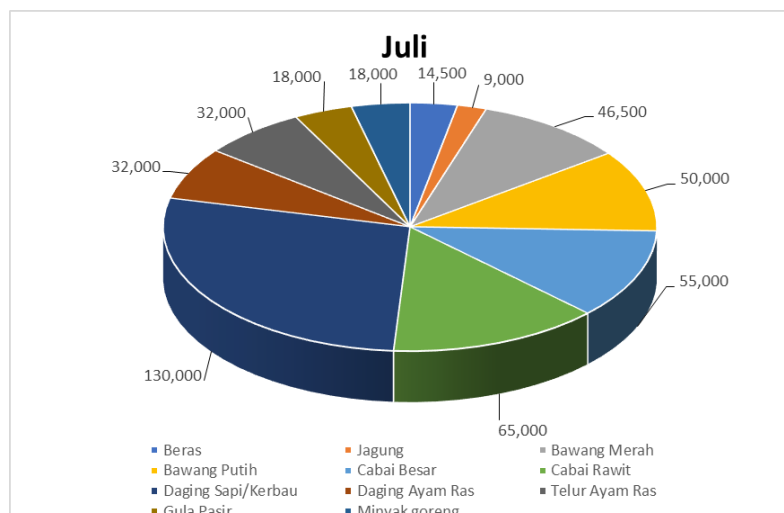
## **LAPORAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KABUPATEN KONAWE SELATAN TRIWULAN III 2025**

### **I. PERKEMBANGAN HARGA PADA KABUPATEN KONAWE SELATAN TRIWULAN III 2025**

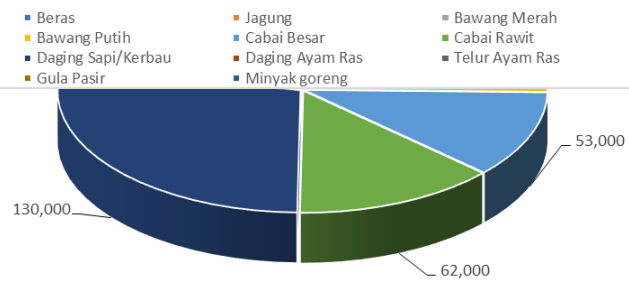
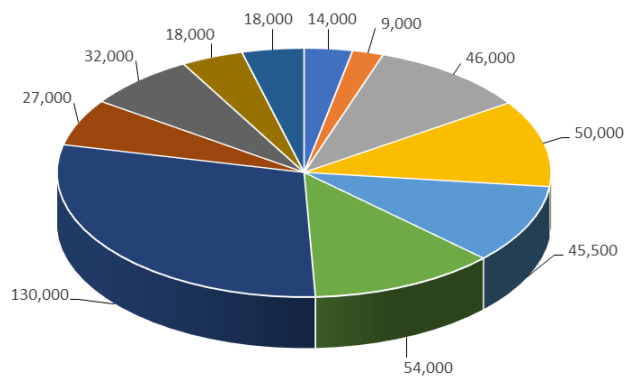
1. Perkembangan harga pada Kabupaten Konawe Selatan didasarkan pada informasi Dinas Ketahanan Pangan yang dikeluarkan secara harian, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dikeluarkan secara mingguan, yang di rekap oleh APIP yang kemudian dilaporkan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Harga rata-rata komoditas jagung, bawang putih, daging sapi, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng, relatif **stabil** selama 3 (tiga) bulan terakhir dan tidak memiliki gejolak harga yang signifikan;
3. Harga rata-rata komoditas beras, bawang merah, cabe besar, cabe rawit, daging ayam ras, relatif **menurun** selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan keterangan sebagai berikut:
  - Komoditas beras turun sebesar Rp.500 atau 3%, penurunan diperkirakan akibat adanya panen dalam hal ini naiknya produksi padi sawah dimana meningkatnya stok dari hasil panen raya yang terjadi pada triwulan II;
  - Komoditas bawang merah turun sebesar Rp.500 atau 1%, penurunan diperkirakan akibat banyaknya pasokan dari daerah lain terutama yang berasal dari daerah penghasil yaitu Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi kenaikan ini tidak signifikan;
  - Komoditas cabe besar turun sebesar Rp.9.500 atau 17%, penurunan diperkirakan akibat banyaknya suplai dari daerah penghasil yaitu dari Provinsi NTB dan Sulawesi Selatan, juga dengan banyaknya stok dimana hanya mengandalkan pengiriman produksi dari daerah lain;
  - Komoditas cabe rawit turun sebesar Rp.11.000 atau 17%, penurunan diperkirakan akibat tingkat produksi mulai membaik setelah musim panen, sehingga pasokan di pasar meningkat relatif terhadap permintaan;
  - Komoditas daging ayam ras sebesar Rp.5.000 atau 16%, penurunan diperkirakan akibat penurunan harga pakan sehingga pasokan yang melimpah;

### **Grafik Perkembangan Harga Komoditas Pangan Triwulan III Kab. Konawe Selatan**





## September



- Beras
- Bawang Putih
- Cabai Besar
- Cabai Rawit
- Daging Sapi/Kerbau
- Daging Ayam Ras
- Telur Ayam Ras
- Bawang Merah
- Jagung
- Minyak goreng
- Gula Pasir

No.	Komoditas	Rata-rata harga Juli 2025 (Rp)	Rata-rata harga Agustus 2025 (Rp)	Rata-rata harga September 2025 (Rp)	%
1	Beras	14,500	14,500	14,000	-3%
2	Jagung	9,000	9,000	9,000	0%
3	Bawang Merah	46,500	43,500	46,000	-1%
4	Bawang Putih	50,000	50,000	50,000	0%
5	Cabai Besar	55,000	53,000	45,500	-17%
6	Cabai Rawit	65,000	62,000	54,000	-17%
7	Daging Sapi	130,000	130,000	130,000	0%
8	Daging Ayam Ras	32,000	32,000	27,000	-16%
9	Telur Ayam Ras	32,000	32,000	32,000	0%
10	Gula Pasir	18,000	18,000	18,000	0%
11	Minyak Goreng	18,000	18,000	18,000	0%

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

## II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kendala yang dihadapi oleh TPID Kabupaten Konawe Selatan pada pelaksanaan pengendalian inflasi dengan kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) adalah sebagai berikut:

1. Fluktuasi pasokan komoditas pangan strategis, khususnya komoditas hortikultura (cabai dan bawang) yang sangat dipengaruhi musim, Pada triwulan III (Juli-September), terjadi panen raya beberapa komoditas hortikultura, namun tidak merata antarwilayah kecamatan;
2. Ketergantungan pasokan dari luar daerah (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah) untuk komoditas tertentu seperti bawang merah, bawang putih, dan daging ayam ras;
3. Daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah, masih rentan terhadap kenaikan harga pangan bergejolak *volatile food*;
4. Kondisi infrastruktur jalan desa dan antar kecamatan yang belum sepenuhnya memadai, terutama di sentra produksi pertanian;
5. Rantai distribusi masih panjang (petani → pengepul → pedagang besar → pedagang eceran), meningkatkan biaya distribusi dan margin harga;
6. Informasi harga dan pasokan belum sepenuhnya tersampaikan secara cepat dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha;
7. Koordinasi antar perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengendalian inflasi masih perlu diperkuat;
8. Edukasi kepada masyarakat terkait pola konsumsi bijak dan diversifikasi pangan masih terbatas;

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

### **III. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Dari Permasalahan yang dihadapi oleh TPID Kabupaten Konawe Selatan pada pelaksanaan pengendalian inflasi dengan kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dengan beberapa langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan *Zoom Meeting* terkait pengendalian inflasi daerah, yang dilaksanakan setiap minggu, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri;
2. Peresmian Pabrik Penggilingan Padi atau Rice Milling Plant (RMP) moderen. Dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 di Desa Puunangga, Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan;
3. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menggelar Tanam Jagung serentak Kuartal III di Lahan Perhutanan Sosial Watumeeto di Kecamatan Lainea, Rabu 9 Juli 2025 yang dilaksanakan oleh Polres Konawe Selatan sesuai program nasional ketahanan pangan;
4. Tim Pengerak PKK Kabupaten Konawe Selatan Gelar Gerakan Tanam Cabai Serentak Se-Sultra kegiatan yang di pusatkan di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto yang digelar secara virtual pada Rabu 16 Juli 2025 sebagai tindak lanjut edaran dari ketua TP PKK Sulawesi Tenggara No 29/SKR/PKK.KS/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025;
5. Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Sumber Sari Kecamatan Moramo pada tanggal 23 Juli 2025 yang di hadiri oleh Ibu Gubernur Sulawesi Tenggara, Ibu Bupati, Wakil Bupati dan PKK Kab. Konawe Selatan;
6. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan Konawe Selatan menyelenggarakan Launching Penyaluran Beras Pemerintah (CBP) dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Serta Gerakan Tanam Cabai Rawit Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Kegiatan ini dilaksanakan Di desa Ambesea, Kec. Laeya, Selasa 29 Juli 2025;
7. Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Lapangan Punggaluku Kecamatan Laeya pada tanggal 14 Agustus 2025 yang di hadiri Kapolres, Koramil dan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Konawe Selatan;
8. Pemerintah Kabupaten Konawe selatan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) Se-Se-Indonesia dalam rangka memperingati HUT RI ke-80, Kegiatan ini dibuka secara daring oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman secara virtual melalui aplikasi Zoom, dan dipusatkan di Kecamatan Konda. (Sabtu, 30/08/2025);
9. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang di laksanakan di Kecamatan Palangga, Jumat, 5 September 2025, Acara ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, melalui virtual zoom dan serentak dilaksanakan di delapan kabupaten/kota;
10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tentang Kerjasama Daerah di bidang Perdagangan

Komoditi Pertanian dalam rangka pengendalian inflasi, yang dilaksanakan di Kota Kendari Pada tanggal 30 September 2025;

11. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pertanian Kota Kendari dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan tentang Perdagangan Sapi Potong, yang dilaksanakan di Kota Kendari Pada tanggal 30 September 2025;
12. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan tentang Perdagangan Telur, yang dilaksanakan di Kota Kendari Pada tanggal 30 September 2025;
13. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pertanian Kota Kendari dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Konawe Selatan tentang Perdagangan Komoditi Hortikultura, yang dilaksanakan di Kota Kendari Pada tanggal 30 September 2025;
14. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan tentang Perdagangan Komoditi Beras, yang dilaksanakan di Kota Kendari Pada tanggal 30 September 2025;
15. Pendataan informasi harga dan ketersediaan bahan pokok penting (Bapokting) pada pedagang pasar dilakukan melalui SIPAS (Sistem Informasi Pasar) berbasis kartu barcode. SIPAS merupakan kartu identitas pedagang yang dilengkapi dengan barcode yang digunakan sebagai media penginputan data harga dan ketersediaan Bapokting secara berkala.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

#### **IV. EVALUASI KEBIJAKAN**

1. Peresmian Rice Milling Plant (RMP) Modern Kebijakan ini strategis dalam memperkuat sisi pasokan beras dan menekan biaya produksi pascapanen. Dampaknya terhadap stabilitas harga beras akan optimal apabila diikuti dengan jaminan serapan gabah petani dan distribusi hasil giling yang merata;
2. Evaluasi Tanam Jagung Serentak Kuartal III Program ini mendukung ketahanan pangan dan diversifikasi komoditas. Namun, kontribusinya terhadap pengendalian inflasi jangka pendek masih terbatas karena hasil panen bersifat jangka menengah dan membutuhkan penguatan akses pasar pascapanen;
3. Evaluasi Gerakan Tanam Cabai Serentak oleh TP PKK Kebijakan ini tepat sasaran karena menyasar komoditas volatile food. Dampaknya lebih bersifat pengendalian inflasi jangka menengah, sehingga perlu kesinambungan pendampingan dan perluasan skala tanam agar berpengaruh signifikan terhadap pasokan pasar;
4. Evaluasi Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Sumber Sari Kecamatan Moramo GPM efektif menekan harga pangan secara langsung dan menjaga daya beli masyarakat yang merupakan desa wisata. Kelemahannya, kegiatan ini bersifat temporer sehingga perlu frekuensi dan berulang jangkauan lokasi yang lebih luas untuk menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan;
5. Evaluasi Launching Penyaluran Beras Pemerintah (CBP), CPPD, dan P2L

Kebijakan ini komprehensif karena menggabungkan intervensi jangka pendek (CBP dan CPPD) dan jangka menengah (P2L), diharapkan Efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima dan pengawasan distribusi pada tiap triwulan;

6. Evaluasi GPM di Kecamatan Laeya (14 Agustus 2025), merupakan pelaksanaan GPM dengan dukungan unsur keamanan meningkatkan kepercayaan publik dan kelancaran distribusi. Namun, variasi komoditas dan volume penjualan perlu ditingkatkan agar dampaknya lebih terasa terhadap harga pasar;
  7. Evaluasi GPM Serentak Se-Indonesia dalam Rangka HUT RI ke-80 merupakan Sinergi Nasional Daerah menjadi kekuatan utama kegiatan ini. Meski berdampak positif terhadap stabilitas harga sesaat, efek jangka panjangnya terbatas tanpa diikuti kebijakan penguatan produksi dan distribusi lokal;
  8. Evaluasi GPM di Kecamatan Palangga (5 September 2025). Kegiatan ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi. Evaluasi ke depan perlu difokuskan pada efektivitas biaya dan pemilihan lokasi berbasis wilayah dengan tekanan inflasi tertinggi;
  9. Evaluasi Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Pemerintah Kota Kendari dalam rangka Kerjasama Antar Daerah (KAD) merupakan kebijakan strategis untuk menjaga kelancaran pasokan antar wilayah. Implementasi teknis dan mekanisme distribusi perlu dipastikan berjalan secara berkelanjutan agar tidak hanya bersifat administratif;
  10. Evaluasi PKS Perdagangan Sapi Potong Kebijakan ini mendukung stabilisasi harga protein hewani. Dampaknya akan lebih optimal jika disertai pengaturan rantai distribusi dan pengendalian biaya transportasi;
  11. Evaluasi PKS Perdagangan Telur kerjasama ini relevan untuk mengendalikan harga telur yang fluktuatif. Tantangan utama terletak pada kontinuitas pasokan dan pengendalian margin di tingkat pedagang;
  12. Evaluasi PKS Perdagangan Komoditas Hortikultura. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat pasokan komoditas hortikultura lintas daerah. Namun, karena sifat komoditas yang mudah rusak, diperlukan dukungan logistik dan *cold chain* agar stabilitas harga terjaga;
  13. Evaluasi PKS Perdagangan Komoditas Beras kerjasama ini sangat strategis dalam menjaga ketersediaan beras. Efektivitasnya ditentukan oleh sinkronisasi data stok dan kecepatan distribusi antar daerah;
  14. Evaluasi Pendataan Informasi Pasar dan Ketersediaan dengan Penambahan Sampel Kebijakan ini memperkuat basis data pengendalian inflasi, engan data yang lebih representatif meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, namun perlu diintegrasikan dalam sistem monitoring yang rutin dan mudah diakses lintas OPD.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

## **V. REKOMENDASI KEBIJAKAN**

1. Memperkuat sinergitas pertemuan teknis penyuluh pertanian dan ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tingkat Kabupaten Konawe



Selatan dalam rangka penguatan sektor pertanian menghadapi dampak krisis pangan global, melalui pemetaan lokasi terdampak, percepatan tanam, kemampuan teknologi, penyediaan benih dan pupuk serta kebijakan strategis lainnya;

2. Mendorong peningkatkan kuantitas dan kualitas komoditas pangan yaitu beras, jagung, cabai rawit, daging sapi dan telur ayam ras melalui perluasan areal tanam melalui Program Ekstensifikasi/perluasan area yang dapat diarahkan pada area yang potensial lainnya;
3. Mendorong peningkatkan teknologi budidaya di sektor pertanian, peternakan, perikanan dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan intervensi alokasi untuk anggaran teknologi budidaya;
4. Keberlanjutan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) sebagai bentuk pengendalian inflasi secara berkelanjutan;
5. Mendorong terbentuknya informasi pasar digital untuk mempermudah pemantauan harga dan pasokan secara berkala serta mereduksi ketimpangan harga antar daerah;
6. Terus memperkuat sinergi TPID terutama dalam mewujudkan 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) kegiatan sidak pasar, pengembangan komoditas pangan strategis menggunakan teknologi tepat guna, serta pendampingan dan fasilitasi kelompok petani, kelompok peternak dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas.